

**KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN PENGEMIS
BERBASIS PANTI UNTUK KEBERFUNGSIAN SOSIAL PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
(STUDI PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL PENGEMIS GELANDANGAN
ORANG TERLANTAR MARDI UTOMO SEMARANG)**

Maryatun^{1*}, Santoso Tri Raharjo²⁾, Budi Muhammad Taftazani³⁾

¹Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
maryatun1383@gmail.com

²Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

³Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
budimtunpad@gmail.com

ABSTRAK

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah gelandangan dan pengemis cukup besar yaitu sebanyak 1.582 jiwa dengan rasio ketersediaan panti yang menangani gelandangan pengemis tergolong rendah yaitu sekitar (1:8). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan angka kemiskinan dan kepadatan penduduk dari 3,74 juta jiwa menjadi 3,98 juta jiwa sehingga berpotensi meningkatnya angka gelandangan pengemis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan gelandangan pengemis pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PPSPGOT) Mardi Utomo Semarang secara komprehensif pada setiap tahapan dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat, sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan penanganan gelandangan pengemis di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan langkah analisis grounded theory, sumber data sekunder berasal dari studi literatur, dokumentasi, buku, artikel dan jurnal dari penelitiain terkait serta data primer dari hasil wawancara dengan pihak panti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan gelandangan pengemis sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, panti melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam sistem kesejahteraan sosial, dan merupakan bentuk usaha pelayanan sosial untuk mencapai keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui upaya rehabilitasi sosial dengan pendekatan pertolongan dalam pekerjaan sosial yang dimulai dari tahap pendekatan awal, tahap pengungkapan dan pemahaman masalah, tahap penyusunan rencana pemecahan masalah, tahap pemecahan masalah, tahap resosialisasi dan tahap terminasi. Terdapat juga faktor pendukung bahkan penghambat dalam proses penanganan gelandangan dan pengemis.

Kata Kunci: Penanganan Gelandangan Pengemis, Berbasis Panti dan Keberfungsian Sosial.

ABSTRACT

Central Java is a province with a fairly large number of homeless people and beggars, namely 1,582 people with a low ratio of the availability of nursing homes that handle homeless beggars (1:8). Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2020, Central Java Province experienced an increase in poverty rates and population density from 3.74 million people to 3.98 million people, thus potentially increasing the number of homeless beggars. The purpose of this study was to find out the implementation of policies for handling homeless beggars at the Mardi Utomo Homeless People's Homeless Social Service Orphanage (PPSPGOT) in a comprehensive manner at each stage and knowing the supporting and inhibiting factors so that efforts can be made to improve the handling of homeless beggars in Central Java Province. This research is a qualitative approach with grounded theoretical analysis steps. Secondary data sources come from literature studies, documentation, books, articles, and journals from related articles and primary data from interviews with



orphanages. The results show that the handling of homeless beggars has been carried out properly, and the orphanage carries out its main tasks and functions based on the Central Java Governor Regulation Number 31 of 2018 concerning the Organization and Work Procedure of the Central Java Provincial Social Service Technical Implementation Unit, which is included in the social welfare system, and is a form of social welfare. social service efforts to achieve the social functioning need for social welfare services (PPKS) through social rehabilitation efforts with a helpful approach in social work starting from the initial approach stage, the problem-solving and understanding stage, the problem-solving plan formulation stage, the problem-solving stage, the resocialization stage, and termination stage. There are also supporting and even hindering factors in the process of handling homeless people and beggars.

Keywords: *Handling Homeless Beggars, Orphanage-Based and Social Functioning.*

PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat yang semakin meningkat pula, hal ini terurai dalam kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia; Sebuah Analisis Kemiskinan dari Sudut Pandang Sosiologi Ekonomi (Bakhri, 2017). Terkait dukungan kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut dapat ditunjukkan sebagaimana data yang bersumber pada Badan Pusat Statistik tentang profil kemiskinan di Indonesia yang menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin sampai dengan September 2019 dapat turun menjadi 9,22 persen (Bakhri, 2017).

Data tersebut belum menunjukkan adanya kesesuaian kondisi di lapangan. Fenomena kemiskinan yang tampak jelas dalam masyarakat adalah masih seringnya kita menjumpai gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di tempat umum, lingkungan perumahan maupun tempat-tempat strategis lain yang memungkinkan mereka melakukan aktivitasnya. Gelandangan dan pengemis di Indonesia khususnya di kota-kota besar merupakan salah satu fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak serta penanganan yang intensif karena merupakan masalah sosial, yaitu “keadaan yang dianggap masyarakat berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya” (Rahman, 2011). Populasi gelandangan dan pengemis dari tahun ke tahun menunjukkan masih sangat memerlukan penanganan serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2019 dalam media kompas.com (Meiliana, 2019), bahwa data populasi Gelandangan pengemis diperkirakan ada 77.500 yang tersebar di kota-kota besar.

Berdasarkan rekap Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, jumlah gelandangan, pengemis dan pemulung sebagai kelompok yang tergolong masih saling memiliki keterkaitan satu sama lain berjumlah 3.458 jiwa (jumlah gelandangan 520; jumlah pengemis 998 dan jumlah pemulung sebanyak 1.940). Selanjutnya data PPKS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa angka gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.518 jiwa menjadi 1.582 jiwa. Panti milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menangani gelandangan pengemis berjumlah 3 (tiga) panti dengan daya tampung PPKS masing-masing sebanyak 110, 50 dan 40 jiwa. Keterbatasan daya tampung mengakibatkan rendahnya rasio jumlah panti pemerintah dan jumlah gelandangan pengemis yang dapat ditangani dalam panti yaitu hanya 1 (satu) berbanding 8 (delapan). Selanjutnya lembaga kesejahteraan non pemerintah di Jawa Tengah berdasarkan data Katalog Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diketahui belum ada LKS yang khusus menangani PGOT. Pelayanan LKS masih ditunjukkan kepada fakir miskin

secara umum atau bergabung dengan jenis penerima manfaat/layanan lain dalam satu lembaga. Dapat diketahui bahwa beberapa lembaga kesejahteraan sosial memberikan pelayanan kepada fakir miskin melalui pendampingan, pemberdayaan dan pemberian bantuan yang tidak berbasis panti. Dari 35 kabupaten/ Kota di Jawa Tengah terdapat 12 Lembaga/ Yayasan yang melakukan pendampingan kepada fakir miskin.

Pendampingan dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan bagi kelompok rentan/ fakir miskin melakukan migrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan atau peruntungan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Rohman (2010), pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen dan pengemis. Permasalahan gelandangan dan pengemis tidak dipungkiri sudah menjadi gejala sosial yang lama hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Menurut (Hanggoro, 2017) pada tahun 1951-1953, Jakarta kebanjiran penduduk dari Cirebon, Pekalongan, Banyumas, Bandung Bogor dan Banten yang diakibatkan belum pulihnya keamanan di daerah, maupun sebagai upaya perjuangan baru. Sebagian besar masyarakat pendatang dikategorikan miskin, mereka tidak mampu membeli sebidang tanah sehingga mereka memanfaatkan tempat-tempat peninggalan Jepang dengan membuat gubuk sementara dari satu tempat ke tempat lain.

Pemerintah secara formal telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah sosial gepeng, namun kenyataannya masih banyak anggota masyarakat yang hidup menggelandang dan mengemis karena berbagai faktor. Faktor penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis menurut (Haryanto, 2010) yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi kemiskinan, umur, rendahnya pendidikan, izin orang tua, rendahnya ketrampilan, sikap mental. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi hidrologis, pertanian, sarana prasarana fisik, akses informasi dan modal usaha, kondisi primisif masyarakat kota, kelemahan penanganan gelandangan pengemis di kota.

Upaya pemerintah menangani masalah gelandangan dan pengemis salah satunya melalui program rehabilitasi sosial berbasis panti. (Haryanto, 2010) mengatakan bahwa usaha rehabilitasi sosial menurut pendekatan pelayanan sosial dapat dilakukan melalui tiga sistem, yaitu 1. Pusat panti/ sasana rehabilitasi sosial. 2. Sistem non panti yang berbasiskan masyarakat. 3. Lingkungan pondok sosial. Pelaksanaan tugas pokok panti pelayanan sosial dalam kegiatan teknis di bidang rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, gelandangan dan pengemis, tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Pemerintah sudah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, yang menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Baker, Dubois dan Miley dikutip dalam (Isfihana, 2010) yang menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarga serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Penelitian terkait penanganan gelandangan dan pengemis beberapa diantaranya menggambarkan implementasi program secara umum yang dilakukan pemerintah maupun pihak terkait, implementasi Peraturan Daerah maupun evaluasi program (Adhe Akbar Apiantara, 2015) (Rohman, 2010); (Alvionita, 2014); (Nusanto, 2017); (Putra, 2019); (Fadri, 2019); (Ramadhani, 2021). Penelitian tentang penanganan gelandangan dan pengemis ini selalu menarik diteliti, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah menarik untuk diteliti dengan sejumlah alasan sebagai berikut:



Pertama, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang cukup besar hingga kini masih terus bermunculan di jalan-jalan pusat kota, terutama di pasar-pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Pada tahun 2012 Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah gelandangan pengemis terbanyak di Indonesia, bahkan gelandangan pengemis yang ada di Jakarta dan Bandung juga kebanyakan berasal dari Jawa Tengah (Tribunjateng, 2012). Penanganan gelandangan pengemis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini belum dikatakan berhasil dan efektif, hal ini diketahui masih banyaknya angka gelandangan dan pengemis bahkan cenderung meningkat pada tahun 2020. *Kedua*, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kenaikan angka kemiskinan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi (Aminah, 2020). Di mana jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat mencapai 3,98 juta jiwa, atau mencapai 11,41 persen dari total populasi penduduk”, dan diketahui angka penduduk miskin Jawa Tengah tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,74 juta jiwa (10,8 persen). Hal ini tentunya semakin memicu peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Ramadhani, 2021) bahwa Penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini tidak terlepas dari penanganan kemiskinan itu sendiri, terutama jika dilihat dari sudut pandang daerah asal gelandangan dan pengemis. Memang, kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya kegiatan menggelandangan dan mengemis tetapi bisa juga menjadi akar penyebab.

Maka hambatan yang terbesar dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah mentalitas, oleh karenanya diperlukan upaya yang mendukung. *Ketiga*, penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis secara komprehensif khususnya di Panti Pelayanan Sosial Gelandangan Pengemis Orang Terlantar (PPS PGOT) Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terbesar yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanganan gelandangan pengemis dan orang terlantar, mengingat peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis belakangan ini cenderung terus bertambah sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan dalam penanganan gelandangan pengemis yang dilakukan oleh PPS PGOT Mardi Utomo Semarang untuk keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dikaji secara komprehensif pada setiap tahapan pelayanan hingga diketahui faktor pendukung dan penghambat di lapangan sehingga penanganan gelandangan pengemis dimaksud dapat dilakukan secara maksimal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan langkah analisis *grounded theory*. Penulis menggunakan sumber data sekunder dari studi literatur/ studi dokumentasi, melalui buku, artikel dan jurnal dari penilitain terkait serta data primer dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat proses penanganan gelandangan dan pengemis. Dalam melakukan analisis, teknis analisis data dimulai dengan mengumpulkan data mentah dari lapangan wawancara, menyusun dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca seluruh data, memberi kode data, menghubungkan tema atau deskripsi, menginterpretasi makna tema/ deskripsi dan validasi akurasi informasi (Creswell, 2019). Langkah meliputi pembuatan kategori atas informasi yang diperoleh mengenai upaya penanganan gelandangan pengemis yang dilakukan panti, memilih kategori dan menempatkannya dalam model teoritis, kemudian merangkai dari hubungan antar kategori/ tema yang akan dianalisis. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif ini, obyek/ peserta yang akan menjadi

informan telah ditentukan (purposive sampling) yaitu melakukan pemilihan/ seleksi dengan sengaja dan penuh perencanaan terhadap orang atau tempat yang terbaik yang dapat membantu peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. Cara ini bertujuan membangun sebuah pemahaman yang detail dan mengungkap masalah yang diteliti secara mendalam. Pada penelitian ini kriteria informan yang dijadikan sebagai acuan adalah subjek yang telah intensif menyatu dan masih atau pernah terlibat dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang dan yang dianggap memiliki kemampuan dan pemahaman terkait tujuan penelitian agar data yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Informan diambil dari unsur pimpinan/ pejabat panti; unsur tata usaha terdiri dari kepala sub bagian tata usaha, petugas administrasi; unsur pelaksana teknis terdiri dari sub koordinator, pekerja sosial, petugas teknis dan unsur pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bina. Sebagaimana tujuan pemilihan informan adalah membangun sebuah pemahaman yang detail, maka jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal sampai mendapat data jenuh.

PEMBAHASAN

Pembahasan terkait kebijakan penanganan gelandangan pengemis berbasis panti untuk keberfungsian sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), studi pada panti pelayanan sosial gelandangan pengemis mardi utomo semarang, peneliti akan membahas berdasarkan hasil kajian teori, analisis, observasi dan wawancara serta studi dokumentasi seperti yang dideskripsikan di bawah ini. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan penanganan gelandangan pengemis berbasis panti, dalam hal ini adalah pelaksanaan proses penanganan gelandangan pengemis dilakukan dalam bentuk serangkaian kegiatan intervensi yang merupakan tahapan pertolongan dalam pekerjaan sosial dan bagian dari sistem kesejahteraan sosial serta sebagai upaya pelayanan sosial dalam mencapai keberfungsian sosial PPKS.

Pengertian dan Batasan Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penanganan adalah, proses, cara, perbuatan menangani atau penggarapan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan pekerjaan sosial, (Iskandar, 1993) mengatakan bahwa proses penanganan permasalahan klien (gelandangan pengemis), pekerja sosial akan mengadakan serangkaian kegiatan intervensi atau proses pertolongan dalam pekerjaan sosial, yang pada hakekatnya merupakan semua tindakan pekerja sosial yang diarahkan kepada beberapa bagian sistem sosial dengan tujuan mengadakan perubahan dalam sistem tersebut. Selanjutnya (Iskandar, 1993) menguraikan tahap intervensi (proses pertolongan) pekerjaan sosial adalah sebagai berikut : 1.) tahap engagement, intake dan kontrak, yaitu tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien; 2.) tahap assessment, yaitu proses pengungkapan/ pemahaman masalah yang meliputi : bentuk dan masalah, ruang lingkup masalah, penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah dilakukan klien, keberfungsian sosial klien saat ini; 3.) tahap membuat perencanaan intervensi, merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut, siapa sasarannya serta bagaimana cara memecahkan di masa mendatang. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan berdasarkan hasil assessment sebelumnya; 4.) tahap melaksanakan program/ intervensi

berdasarkan rencana intervensi dengan melibatkan klien secara aktif pada setiap tahapan; 5.) tahap evaluasi, pekerja sosial mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilaksanakan untuk melihat tingkat keberhasilannya, tingkat kegagalannya dan hambatan yang ada. Ada 2 aspek yang harus dievaluasi oleh klien yaitu tujuan hasil dan tujuan proses. 6.) tahap terminasi (pengakhiran/pemutusan kegiatan pertolongan). Tahap ini dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah tercapai atau terjadi referral atau karena alasan rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Proses pemecahan masalah maka digunakan metode pertolongan kepada klien yang mencakup model pendekatan, metode dan teknik pertolongan maupun strategi dan taktik pertolongan yang berbeda. Pola penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang dapat ditujukan pada penanganan gelandangan pengemis dalam perspektif pekerjaan sosial disampaikan (Hurairah, 2008) terdapat 3 (tiga) pendekatan yaitu : pendekatan filantropi sosial, pendekatan pekerjaan sosial dan pendekatan administrasi sosial. Sedangkan menurut Fadhil yang dikutip dalam (Anggriawan, 2010), mengungkapkan bahwa ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menangani masalah kesejahteraan antara lain : metode persuasif motivative, metode konsultatif dan metode partisipasi.

Uraian di atas diketahui salah satu metode yang dapat digunakan dalam menangani masalah klien (gelandangan pengemis adalah dengan metode partisipatif. Metode partisipatif sendiri sejalan dengan pendekatan dalam pemberdayaan (Miley Karla Krogsrud et al., 2017). Selanjutnya metode konsultatif dalam penanganan gelandangan pengemis dijelaskan sebelumnya yaitu melalui pelaksanaan bimbingan dan pelayanan serta kegiatan-kegiatan pembangunan sosial secara konsultasi antara petugas pemerintah dengan masyarakat. Hal ini relevan dengan yang pelaksanaan usaha rehabilitasi yang diterapkan oleh panti rehabilitasi maupun panti pelayanan. Menurut (Supiadi, 2004) Usaha-usaha yang dipandang perlu diselenggarakan dalam rehabilitasi sosial meliputi bimbingan sosial, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian, pendidikan, pemberian bantuan/ fasilitas, meliputi usaha penempatan kerja, bantuan permodalan atau fasilitas yang diperlukan untuk berwiraswasta dan pembinaan lanjut.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Sistem Kesejahteraan Sosial

Penanganan gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab berbagai pihak maupun kalangan karena maraknya gelandangan pengemis memperlihatkan penanganannya yang belum maksimal. Penanganan gelandangan pengemis menjadi tantangan bagi pengambil kebijakan karena masalah yang dihadapi begitu kompleks (Fadri, 2019). Tujuan dari penanganan gelandangan pengemis secara umum adalah agar mereka dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Adi, 2018), kesejahteraan sosial dalam artian luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, yang tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental dan segi spriritual.

Adi (2018), selanjutnya mengatakan bahwa sebagai suatu layanan, pengertian kesejahteraan sosial dapat dikembangkan dari definisi yang disampaikan Friedlander. “Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan layanan kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Sedangkan Suharto (2017), mengatakan pengertian kesejahteraan sosial menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat terutama kelompok yang kurang beruntung.



Menurut Midgley (1995:14) yang dikutip dalam (Adi, 2018), kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu : tingkatan di mana suatu masalah sosial dapat dikelola; sejauhmana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi; tingkatan di mana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan/ difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya dari beberapa definisi gelandangan dan pengemis dari para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat sehingga perlu dilakukan satu penanganan untuk memenuhi kebutuhan mereka serta memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan diri. Upaya kesejahteraan sosial, merupakan salah satu dari berbagai upaya pemerintah yang dirancang untuk melindungi warga negara dari risiko ekonomi dan ketidakamanan hidup yang memberikan manfaat kepada orang tua atau pensiunan, orang sakit atau cacat, ibu, pengangguran, korban kecelakaan kerja, keluarga dan lainnya. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah produk dari kebijakan kesejahteraan sosial, meliputi kesejahteraan dan kepentingan banyak orang, termasuk kebutuhan fisik, mental, emosional, spiritual, dan ekonomi mereka (Pinker, 2021). Dari penjelasan tersebut maka upaya penanganan gelandangan dan pengemis termasuk ke dalam sistem kesejahteraan sosial sehingga kondisi kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kebijakan pemerintah.

Penanganan Gelandangan Pengemis sebagai Bentuk Usaha Pelayanan Sosial

Penanganan gelandangan dan pengemis oleh panti merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melayani dan melindungi warga negara dari risiko ekonomi dan ketidakamanan hidup. Layanan kesejahteraan sosial menurut (Pinker, 2021) disebut juga sebagai layanan sosial atau pekerjaan sosial, yang merupakan salah satu dari banyak layanan publik pemerintah atau swasta yang dimaksudkan untuk membantu orang atau kelompok yang kurang beruntung, tertekan atau rentan. Istilah layanan sosial juga menunjukkan profesi yang terlibat dalam memberikan layanan tersebut. Di beberapa negara, dibuat perbedaan antara “layanan sosial” yang menunjukkan program, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, yang melayani masyarakat umum, dan “layanan kesejahteraan” yang menunjukkan bantuan yang ditunjukkan kepada kelompok rentan, seperti orang miskin, penyandang cacat, dan sebagainya.

Suharto, (2017) menyampaikan bahwa pelayanan sosial dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk membantu individu atau sekelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial lainnya. Bentuk layanan sosial menurut Suharto, (2017) dapat dikategorikan berdasarkan pelayanannya, (misalnya pelayanan atau perawatan anak, remaja, lanjut usia), setting atau tempatnya (misal pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, penjara, rumah sakit dsb) atau berdasarkan jenis atau sektor (misalnya pelayanan konseling, kesehatan mental, pendidikan khusus dan vokasional, jaminan sosial, perumahan). Dari penjelasan tersebut penanganan gelandangan dan pengemis dapat dikategorikan dalam program pelayanan sosial, sebagaimana telah disinggung diawal bahwa pelayanan sosial ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut (Fadri, 2019) penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut : 1. Panti, yaitu penanganan gelandangan dan pengemis menyediakan tempat tinggal dengan sarana prasarana lengkap, yang dihuni oleh beberapa keluarga 2. Lingkungan pondok sosial (Liponsos), yaitu sistem penanganan gelandangan dan pengemis lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkup sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya, 3. Transtit home, yaitu penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap, sebagai peralihan kehidupan di jalanan dengan tempat tinggal



yang ditentukan. 4. Pemukiman masyarakat, bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu 5. Transmigrasi, sebagai cara terakhir yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, penanganan gelandangan dan pengemis yang dikaitkan dengan usaha layanan sosial, oleh (Haryanto, 2010) dibedakan menurut pendekatan pelayanan sosial dapat dilakukan melalui tiga sistem, yaitu : pusat panti/sasana rehabilitasi sosial; sistem non panti yang berbasiskan masyarakat, dan lingkungan pondok sosial.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis untuk Keberfungsian Sosial PPKS di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang

Penanganan gelandangan dan pengemis maka secara umum upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh panti sudah terpolakan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang dapat ditujukan pada dalam perspektif pekerjaan sosial yaitu melalui pendekatan filantropi sosial yang oleh masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah kesetiakawanan sosial, solidaritas sosial, atau kedermawanan sosial. Kegiatan ini sudah dipraktikkan selama berabad-abad. Di masyarakat kita, sudah menjadi tradisi bahwa keluarga, kerabat, tetangga saling membantu jika salah satu dari mereka tertimpa musibah yang kemudian terdapat sistem rujukan dan pelaporan dari masyarakat. Selanjutnya panti sudah melakukan pendekatan pekerjaan sosial yang bergantung pada tenaga profesional yang mendukung tujuan-tujuan kesejahteraan sosial serta pendekatan administrasi sosial yakni pendekatan yang bergantung pada intervensi pemerintah melalui pelayanan-pelayanan yang resmi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Beberapa metode yang digunakan panti dalam menangani gelandangan pengemis ini diantaranya metode persuasif motivatif, panti tidak melakukan tekanan, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukan pelayanan. Panti mendasarkan kesediaan seseorang, keluarga, kelompok, dan kesatuan masyarakat atas kebutuhan atau kepentingan yang dirasakan sendiri, untuk berkerjasama, membina, dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka atas kemampuan mereka sendiri. Berikutnya metode konsultatif, panti melaksanakan pelayanan mendasarkan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan serta kegiatan pembangunan sosial secara konsultasi antara petugas pemerintah dengan masyarakat untuk mengembangkan alternatif pencegahan dan penanggulangan masalah serta mengembangkan kondisi kearah yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya metode partisipasi, panti menempatkan populasi pelayanan ataupun populasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial tidak sebagai objek melainkan sebagai subjek yang akan meningkatkan dan mengembangkan dirinya di dalam rangka perwujudan pembangunan nasional.

Usaha-usaha yang dilaksanakan panti dalam rehabilitasi sosial meliputi : bimbingan sosial, (etika, peran dan tanggungjawab sosial, dinamika kelompok), bimbingan mental (mental psikologis dan spiritual), bimbingan fisik (olah raga dan perawatan kesehatan), bimbingan keterampilan (pemberian pelatihan pertukangan, pembuatan telur asin dan ketrampilan tata boga lainnya, ketrampilan membuat, menjahit, budidaya ternak lele dan pertanian). Selanjutnya bagi yang memenuhi kriteria dapat mengikuti program upaya pemberdayaan melalui pemberian bantuan/ stimulus usaha kuliner yang berlokasi di taman Mardi Utomo. Bimbingan kepada PPKS secara umum dilakukan secara individu maupun kelompok.

Kesejahteraan sosial yang merupakan sistem terorganisir berbagai institusi dan layanan kesejahteraan sosial guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat terutama

kelompok yang kurang beruntung. Maka dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan panti berada pada sistem kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan definisi pelayanan sosial yang dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk membantu individu atau sekelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan akan menimbulkan masalah sosial lainnya sehingga pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis merupakan kebijakan dalam pelayanan sosial.

Penanganan gelandangan pengemis menjadi tantangan bagi pengambil kebijakan karena masalah yang dihadapi begitu kompleks (Fadri, 2019). Tujuan dari penanganan gelandangan pengemis secara umum adalah agar mereka dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Adi, 2018), kesejahteraan sosial dalam artian luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, yang tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental dan segi spriritual. Adi (2018), selanjutnya mengatakan bahwa sebagai suatu layanan, pengertian kesejahteraan sosial dapat dikembangkan dari definisi Friedlander. “Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan layanan kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Sedangkan Suharto (2017), mengatakan pengertian kesejahteraan sosial menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Penanganan gelandangan dan pengemis oleh panti salah satunya yang dilakukan Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melayani dan melindungi warga negara dari risiko ekonomi dan ketidakamanan hidup. Layanan kesejahteraan sosial menurut (Pinker, 2021) disebut juga sebagai layanan sosial atau pekerjaan sosial, merupakan salah satu dari banyak layanan publik pemerintah atau swasta yang dimaksudkan untuk membantu orang atau kelompok yang kurang beruntung, tertekan atau rentan. Istilah layanan sosial juga menunjukkan profesi yang terlibat dalam memberikan layanan tersebut. Di beberapa negara, dibuat perbedaan antara “layanan sosial” yang menunjukkan program, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, yang melayani masyarakat umum, dan “layanan kesejahteraan” yang menunjukkan bantuan yang ditunjukkan kepada kelompok rentan, seperti orang miskin, penyandang cacat, dan sebagainya.

Suharto, (2017) menyampaikan bahwa pelayanan sosial dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk membantu individu atau sekelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial lainnya. Bentuk layanan sosial menurut Suharto, (2017) dapat dikategorikan berdasarkan pelayanannya, (misalnya pelayanan atau perawatan anak, remaja, lanjut usia), setting atau tempatnya (misal pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, penjara, rumah sakit dsb) atau berdasarkan jenis atau sektor (misalnya pelayanan konseling, kesehatan mental, pendidikan khusus dan vokasional, jaminan sosial, perumahan). Dari penjelasan tersebut penanganan gelandangan dan pengemis dapat dikategorikan dalam program pelayanan sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka gelandangan dan pengemis termasuk dalam individu atau kelompok tersebut. Suharto, (2017) lebih lanjut menyampaikan bahwa pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat usaha yang ditunjukkan untuk membantu individu atau sekelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial lainnya.

Sedangkan berdasarkan jenis atau sektor layanan yang diberikan bagi gelandangan dan pengemis bisa berupa jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan maupun pelayanan sosial personal.

Keberfungsian sosial menjadi fokus utama pekerjaan sosial melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial, yang didefinisikan sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi atau merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan. Kemampuan sosial melaksanakan peranan sosial adalah kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya Suharto, (2017). Sebagaimana diuraikan oleh (Iskandar, 1993) bahwa proses penanganan permasalahan klien (gelandangan pengemis), pekerja sosial dalam hal ini pihak panti akan mengadakan serangkaian kegiatan intervensi atau proses pertolongan yang pada hakekatnya merupakan semua tindakan pekerja sosial yang diarahkan kepada beberapa bagian sistem sosial dengan tujuan mengadakan perubahan dalam sistem tersebut. Selanjutnya menurut (Iskandar, 1993) tahap intervensi dilaksanakan mulai dari tahap engagement, intake dan kontrak; tahap assessment; tahap membuat perencanaan intervensi; tahap melaksanakan program/ intervensi, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan penanganan gelandangan pengemis di panti pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar Mardi Utomo Semarang, dalam prakteknya panti melaksanakan upaya pemberian layanan bagi PPKS PGOT untuk mencapai keberfungsian sosial mereka didasarkan pada tugas pokok dan fungsi panti sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial bagi gelandangan pengemis. Pendekatan yang digunakan dalam proses rehabilitasi yaitu pendekatan pertolongan dalam pekerjaan sosial yang dimulai tahap pendekatan awal, tahap pengungkapan dan pemahaman masalah, tahap penyusunan rencana pemecahan masalah, tahap pemecahan masalah, tahap resosialisasi dan tahap terminasi yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Awal; berdasarkan hasil penelitian, pendekatan awal yang dilakukan PPSPGOT Mardi Utomo dalam penanganan gelandangan pengemis dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti sosialisasi, orientasi, konsultasi, identifikasi dan seleksi. Dalam pelaksanaannya proses seleksi mendapatkan calon penerima layanan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti didapat melalui hasil rujukan, sosialisasi dan motivasi yang dilakukan langsung ke lokasi tempat gelandangan pengemis berada. Pendekatan awal dilakukan juga dengan sosialisasi, orientasi dan konsultasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang program layanan sosial yang dilakukan PPSPGOT ke instansi terkait yang dapat membantu dalam pelaksanaan program guna memperoleh dukungan dan kerjasama. Selanjutnya dilakukan identifikasi untuk mengenal dan memahami masalah dari calon penerima layanan, memotivasi untuk menumbuhkan kesadaran dan minat gelandangan pengemis dalam mengikuti proses layanan serta pelaksanaan seleksi yang dilakukan untuk memilih dan menetapkan calon pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang dilanjutkan dengan penerimaan melalui registrasi dan penempatan PPKS dalam asrama.
2. Pengungkapan dan Pemahaman masalah; menurut Zasrow (2013) asesmen terkait dengan penilaian pekerja sosial dalam mengumpulkan, mengatur, dan menafsirkan data klien, menilai kekuatan dan keterbatasan klien, mengembangkan tujuan dan sasaran intervensi yang disepakati bersama serta memilih strategi intervensi yang tepat. Dalam hal ini peran pekerja sosial dalam kegiatan adalah melakukan proses pengungkapan dan penelaahan masalah melalui wawancara dan tes asesment dalam rangka mendapat informasi yang menyeluruh tentang kondisi dan

- permasalahan klien guna pengambilan keputusan penempatan pada program yang tepat, meliputi: Pemeriksaan aspek fisik dan kesehatan, Pemeriksaan aspek mental psikologis, Pemeriksaan aspek sosial, Pemeriksaan aspek vokasional. Data–data mengenai hal tersebut oleh pekerja sosial disimpan dengan baik pada folder masing-masing klien dan bersifat rahasia.
3. Penyusunan rencana pemecahan masalah; meliputi rencana kegiatan bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan pelatihan keterampilan. Adapun model rancangan kegiatan berisi tentang pendahuluan, nama kegiatan, tujuan, sasaran, proses, pelaksana sarana dan prasarana, keunggulan dan keterbatasan, kondisi program yang dibutuhkan. Rencana kegiatan intervensi yang telah disusun oleh Pekerja Sosial selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan Metode Case Work atau Group Work, tergantung jenis permasalahannya. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di rujuk kepada pihak lain seperti Psycolog untuk masalah mental psikologis, dokter/tim medis untuk masalah kesehatan. Demikian halnya dengan permasalahan lainnya.
 4. Pemecahan masalah; dalam proses pemecahan masalah (intervensi), seorang pekerja sosial memulai tindakan untuk mencapai tujuan organisasi, menerapkan upaya pencegahan terjadinya masalah, peningkatan kapasitas klien, membantu klien menyelesaikan masalah, bernegosiasi, menengahi, dan mengadvokasi klien serta memfasilitasi transisi. Dengan ini, kegiatan intervensi atau pemecahan masalah dilaksanakan berdasarkan rencana intervensi yang telah disusun oleh pekerja sosial sebelumnya. Pekerja Sosial dalam tahapan pelaksanaan intervensi ini terkadang berperan sebagai motivator, guru, konselor, ataupun mediator. Sehingga hampir semua kegiatan seperti bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan pelatihan keterampilan, telah dibagi kepada pegawai di lingkungan panti yang bertanggung jawab kepada kelompok PPKS mengingat keterbatasan jumlah pekerja sosial. Secara langsung intervensi dilakukan melalui keterlibatan pekerja sosial/ petugas dengan PPKS melalui pertemuan seperti penyuluhan, bimbingan sosial, wawancara, konseling. Selanjutnya intervensi yang tidak secara langsung dilakukan pekerja sosial/ petugas yang berperan sebagai fasilitator dan broker atau menghubungkan PPKS dengan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), melakukan pengkajian melalui case converence (CC) terhadap masalah yang dialami PPKS, menjalin kemitraan dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha/ perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dsb guna peningkatan proses layanan panti. Salah satu kerjasama guna peningkatan layanan sosial terhadap PPKS menggunakan pendekatan pemberdayaan yaitu bermitra dengan Corporate Social Responsibility (CSR) badan usaha/ perusahaan maupun institusi pendidikan/ akademisi yang memiliki kesamaan visi.

Pemberdayaan dalam hal ini menjadi relevan ketika diterapkan dalam penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga upaya pemberdayaan menjadi pendukung dalam proses pelayanan sosial selain pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan kepada penerima manfaat pengemis gelandangan dan orang terlantar yang tinggal di panti dengan berpegang pada beberapa elemen dan prinsip, tujuan dan sasaran maupun praktik pemberdayaan yang sesuai. Konteks pemberdayaan yang dilakukan oleh panti dimulai dari individu dalam mempelajari cara pembuatan keputusan, pengaturan sumber daya dan kerja sama yang selanjutnya akan dilihat hasil (berdaya) melalui perasaan control, kesadaran kritis dan perilaku partisipasif (Rappaport Julian & Seidman Edward, 2000).

1. Resosialisasi; kegiatan terkait dengan kesiapan PPKS dan lingkungan sebelum pelaksanaan penyaluran kembali ke masyarakat agar dapat berinteraksi dengan baik. Bimbingan kesiapan dan



peran serta masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dan kemauan PPKS untuk berintegrasi dengan masyarakat. Dalam hal ini juga dilakukan evaluasi terhadap perkembangan PPKS terkait program layanan yang diberikan oleh panti, bimbingan motivasi kepada keluarga (jika ada) maupun penyuluhan sosial bagi lingkungan masyarakat, persiapan lapangan kerja bagi PPKS atau memastikan potensi sumber yang dapat diakses oleh PPKS. Kegiatan resosialisasi terlihat kurang maksimal karena terkendala sarana dan prasarana.

2. Terminasi; proses terminasi merupakan kegiatan pengakhiran pelayanan karena klien telah selesai mengikuti serangkaian layanan sosial yang diberikan oleh PPKSPGOT Mardi Utomo Semarang.

Pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial/ petugas terhadap PPKS sebagai penerima layanan pada Pantii Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang meliputi seluruh proses pelayanan sosial yang menjadi program panti. Kegiatan dimulai dari pendekatan awal, yang di dalamnya terjadi proses kontrak dan kontak calon PPKS dengan pekerja sosial/ petugas, dilanjutkan dengan penelaahan dan pengungkapan masalah (asesmen) dalam rangka mendapat informasi yang menyeluruh tentang kondisi dan permasalahan klien guna pengambilan keputusan dalam memberikan jenis layanan yang mendesak dan tepat. Setelah memperoleh hasil pengungkapan dan pemahaman masalah selanjutnya dilakukan CC guna menyusun rencana intervensi dan mengarahkan PPKS untuk mengikuti program/ kegiatan bimbingan yang disesuaikan dengan hasil assessment. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PPKS meliputi rencana kegiatan bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan serta kegiatan yang diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan. Rencana kegiatan intervensi yang telah disusun oleh petugas selanjutnya dilaksanakan dengan menggunakan metode Case Work, group work yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan PPKS.

Pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis dilakukan melalui tahapan proses layanan yang tidak selalu diikuti keseluruhan oleh calon PPKS, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan calon PPKS serta pelaksanaan asesmen yang dilakukan terhadap calon PPKS/PPKS tidak hanya dilakukan pada tahap awal pelayanan, namun dapat dilakukan berulang kali meskipun sedang dalam proses tahapan selanjutnya hal ini dilakukan agar PPKS dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan terpenuhi kebutuhannya sehingga secara sosial dapat berfungsi dengan baik. Dapat dikatakan PPKS berperan serta aktif dalam mengikuti setiap tahapan layanan sosial

KESIMPULAN

Penanganan gelandangan pengemis yang dilakukan oleh panti pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar Mardi Utomo Semarang sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sistem kesejahteraan sosial, dan merupakan bentuk usaha pelayanan sosial untuk mencapai keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui upaya rehabilitasi sosial dengan pendekatan pertolongan dalam pekerjaan sosial yang dimulai dari tahap pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, resosialisasi dan tahap terminasi.

Faktor pendukung dalam penanganan pengemis gelandangan oleh panti pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar, yaitu adanya dukungan inovasi dan pengembangan program oleh pihak pejabat panti dalam meningkatkan layanan; kerjasama antara petugas dalam pelaksanaan



elayanan sosial bagi PPKS PGOT untuk keberfungsian sosial mereka; adanya dukungan dan sinergitas penguatan jejaring serta kondisi geografis panti untuk pengembangan wisata. Sementara faktor penghambat dalam penanganan gelandangan pengemis yang dilaksanakan oleh PPS PGOT Mardi Utomo Semarang yaitu : keterbatasan tenaga pekerja sosial maupun petugas teknis baik dari segi kuantitas dan kualitas; belum adanya instrument assessment maupun form layanan lain yang seragam untuk digunakan dalam setiap tahapan layanan kepada PPKS; kurang proaktifnya beberapa pihak pemerintah kabupaten kota dalam upaya penanganan gelandangan pengemis; masih adanya pelabelan negatif bagi PPKS PGOT pura bina; kurang maksimalnya upaya pembinaan serta monitoring dan evaluasi dari instansi Pembina (Dinas Sosial) yang dapat mengakomodir hingga teknis pelaksanaan program layanan sosial serta adanya keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan sosial secara maksimal.

Hasil identifikasi faktor pendukung dan penghambat maka diharapkan akan semakin meningkatnya pelayanan sosial bagi PPKS PGOT yang dilaksanakan oleh PPS PGOT Mardi Utomo Semarang dengan cara menginisiasi kerja sama dan mengadakan pertemuan antar panti maupun pihak yang berkompeten dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial bagi petugas; melakukan koordinasi dengan instansi pembina dalam upaya peningkatan kerja sama lintas sektor dan keterlibatan multi sektor dalam penanganan permasalahan gelandangan pengemis; melakukan upaya pemetaan tren permasalahan serta memprediksi peluang yang dapat ditangkap dalam upaya penanganan gelandangan pengemis sebagai masukan dalam perencanaan program berikutnya; meningkatkan dan menyesuaikan program layanan sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dari sudut pandang PPKS dan didasarkan pada karakteristik yang berbeda pada masing-masing PPKS sehingga metode intervensi yang dilakukan tepat; melengkapi administrasi dan dokumentasi PPKS yang dilayani sehingga keberhasilan PPKS dapat terukur melalui form perkembangan dan layak dilakukan terminasi. Perlunya mempertimbangkan kebutuhan panti yang memiliki kompleksitas permasalahan dari perbedaan karakteristik PPKS dari tahapan pendekatan awal hingga terminasi. Sementara itu, besarnya potensi yang dimiliki panti salah satunya yaitu ketersediaan lahan yang luas, diperlukan dukungan program inovasi yang menyeluruh dari instansi pembina guna mencapai kemandirian dan keberfungsian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhe Akbar Apiantara. (2015). Evaluasi Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*.
- Alvionita, W. (2014). Implementasi Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 1410511007.
- Aminah, A. N. (2020). *Dampak Ekonomi Covid-19 Kian Terasa di Jawa Tengah*. <https://www.republika.co.id/berita/qolfc4384/dampak-ekonomi-covid19-kian-terasa-di-jateng>
- Anggriawan, D. (2010). Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo. *Penerapan Pembelajaran Menggunakan Media Pembelajaran Berbasis Animasi Flash Pada Mata Pelajaran Menggunakan Listrik Di SMKN 5 Padang*, 53(9), 1689–1699.

- Bakhri. (2017). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia; Sebuah Analisis Kemiskinan Dari Sudut Pandang Sosiologi Ekonomi*.
<https://www.bing.com/search?q=Penanggulangan+Kemiskinan+Di+Indonesia%3B+Sebuah+Analisis+Kemiskinan+Dari+Sudut+Pandangan+Sosiologi+Ekonomi&aqs=edge..69i57j69i60.10002j0j1&pqlt=43&FORM=ANCMS9&PC=ASTS>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1–19.
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- Hanggoro, H. T. (2017). *Memandang Laku Menggelandang*. 2021, Januari, 1. Nuun.id.
<http://nuun.id/memandang-laku-menggelandang>. Diakses pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Haryanto. (2010). *Diktat bahan kuliah rehabilitasi*.
- Hurairah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Humaniora.
- Isfihana, D. (2010). *Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Liposos Keputih oleh Dinas Sosial Kota Surabaya* (pp. 28–44). Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Iskandar, J. (1993). *Beberapa Keahlian Penting dalam Pekerjaan Sosial*. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Meiliana, D. (2019). Diperkirakan ada 77.500 Gepeng di kota-kota besar di Indonesia. In *Kompas.com* (Issue 2, pp. 1–13). <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkirakan-ada77500-gepeng-di-kota-kota-besar-di-indonesia>
- Miley Karla Krogsrud, W, O. M., & L, D. B. (2017). *Generalist Social Work Practice An Empowering Approach*. <https://doi.org/10.987654321-EB-1514131211>.
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar) in Jember District). *Jurnal Politico*, 17(2, September), 339–360.
- Pinker, R. A. (2021). *Social Service*. <https://www.britannica.com/topic/social-service>
- Putra, M. L. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics* (Vol. 26, Issue 3). <https://doi.org/10.1007/s11273-020-097063-0>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008>
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919>
<https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004>
- Rahman, T. (2011). *Glosari Teori Sosial* (M. Mustari (ed.)). Bandung : Ibnu Sina Press.
- Ramadhani, W. (2021). *Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)*. 16, 156–167
- Rappaport Julian & Seidman Edward. (2000). Empowerment Theory. In *Handbook of Community Psychology*. <https://doi.org/10.1007/978-1-46154193-6>
- Rohman, A. (2010). *Program Penanganan Gelandangan , Pengemis , dan Anak Jalanan Terpadu*. February, 1–14. <https://doi.org/10.13140/2.1.1126.4805>
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (S. Aep Gunarsa (ed.)). PT Refika Aditama

Bandung.

Supiadi, E. (2004). *Kajian Masalah dan Pelayanan Bagi Penyandang Cacat Netra*. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Tribunjateng. (2012). *Jumlah Gepeng di Jawa Tengah Terbanyak di Indonesia*.
<https://jateng.tribunnews.com/2012/12/28/jumlah-gepeng-di-jawa-tengah-terbanyak-di-indonesia>

Zastrow, C. (2013). *The Practice Of Social Work A Comprehensive Worktext* 10th Edition. Linda Shreiber

